

1. Tidak boleh jika melamar seorang wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, karena perbuatan meminang ini akan membawa *mafsadat*, ialah meminang seorang wanita yang sedang *iddah*.
2. Tidak boleh jual beli secara cash dan berjangka di dalam satu akad karena ini perbuatan jual beli ini akan berefek kepada *mafsadat*, ialah transaksi yang terdapat riba. Yang diperbolehkan ialah jual beli secara cash dan dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara berjangka (melakukan dua transaksi akad yang terpisah)
3. Tidak boleh jika kreditur mendapatkan sebuah hadiah dari debitur, karena pada saat itu debitur ini mengingkari penundaan pembayaran (*rescheduling*), karena penerimaan harta ini membawa kepada *mafsadat* ialah sebuah transaksi yang terdapat ribawi.
4. Di tetapkannya pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai suatu perbuatan yang menghalangi sebagai sebuah hak kewarisan ahli waris tersebut, supaya perbuatan ini tidak dijadikan jalan untuk mendapatkan dan mempercepat jalannya warisan tersebut.
5. Tidak boleh terhadap suatu kaum muslimin saat masuk di Makkah, sebelum hijrahnya ke Madinah membaca kitab suci Al-Qur'an dengan suara nyaring. Perbuatan ini dilarang karena berpedoman kepada pertimbangan supaya kaum kafir Quraisy tidak menghina

mata uang diatas menjelaskan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

"Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya," tulis *Peter* dalam siaran pers yang dikeluarkan hari Kamis (6/2/2014).²⁴

Pengumuman tersebut sekaligus menyatakan sikap serupa dari BI terhadap mata uang-mata uang *virtual* lain di luar *Bitcoin*. Dengan demikian, *virtual currency* alternatif, semacam *Dogecoin* dan *Litecoin* juga tidak diakui sebagai alat pembayaran. Sebelumnya, pada pertengahan Januari lalu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Roland Waas telah mengatakan bahwa semua transaksi di NKRI harus menggunakan mata uang Rupiah.

Kendati demikian, BI tidak menetapkan peraturan yang secara khusus melarang penggunaan *Bitcoin*. Ini berarti para pemilik *Bitcoin* masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut. Hanya saja, tidak ada perlindungan hukum apabila terjadi kasus-kasus seperti pencurian atau penipuan yang melibatkan *virtual currency* itu.

²⁴Data
"Sikap.Resmi.Bank.Indonesia.soal.Bitcoin", <http://tekno.kompas.com/read/2014/02/07/1505320/In>
[i.](#), diakses pada 30 Agustus 2017.